



Efisiensi vs. Kualitas: Evaluasi Kebijakan Anggaran Pendidikan dalam Pemerintahan Prabowo

Ajeng Faizah Ilma^{1*}, Anandhiya Intan Prabandari¹,

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*Corresponding Author: ajeng.ilma@unsoed.ac.id

Article Information

History of Article:

Received: March 6th

2025

Accepted: March 20th

2025

Published: April 29th

2025

Keywords:

Education Budget
Efficiency, Quality of
Higher Education,
Educator Welfare,
Indonesian Education
Policy

Abstract

This study evaluates the impact of education budget efficiency policies implemented during President Prabowo's administration on the quality of education, the welfare of educators, and the accessibility of higher education in Indonesia. Prior to the enactment of these policies, the national education sector already faced challenges such as limited facilities, low educator welfare, and high costs of higher education. Using a qualitative approach that includes in-depth interviews, case studies, and field observations, the study finds that budget cuts have worsened learning quality, increased educators' workloads, raised the cost of higher education, and widened educational access inequality. Thematic analysis reveals systemic disparities among universities, sustainability dilemmas in financing, and a crisis in educators' welfare. The findings affirm that efficiency policies without social mitigation risk hindering human resource development and reducing Indonesia's global education competitiveness. The study recommends implementing performance-based budget allocation, differentiated funding strategies, and strengthening public-private collaborations to ensure the sustainability of the education sector.

Abstrak

History of Article:

Diterima: 6 Maret 2025

Disetujui: 20 Maret
2025

Dipublikasikan: 29
April 2025

Penelitian ini mengevaluasi dampak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo terhadap kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pengajar, dan aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, sektor pendidikan nasional sudah menghadapi

Kata Kunci:
Efisiensi Anggaran
Pendidikan, Kualitas
Pendidikan Tinggi,
Kesejahteraan Tenaga
Pendidik, Kebijakan
Pendidikan Indonesia

tantangan seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya kesejahteraan pendidik, dan tingginya biaya pendidikan. Melalui pendekatan kualitatif yang mencakup wawancara mendalam, studi kasus, dan observasi lapangan, penelitian ini menemukan bahwa pemangkasan anggaran memperburuk kualitas pembelajaran, meningkatkan beban kerja pendidik, menaikkan biaya pendidikan tinggi, serta memperselebar kesenjangan akses pendidikan. Analisis tematik mengungkapkan ketimpangan sistemik antar perguruan tinggi, dilema keberlanjutan pembiayaan, dan krisis kesejahteraan tenaga pendidik. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tanpa mitigasi sosial berisiko menghambat pembangunan sumber daya manusia dan menurunkan daya saing pendidikan Indonesia secara global. Rekomendasi yang diberikan meliputi penerapan alokasi anggaran berbasis kinerja, diferensiasi pendanaan, dan penguatan kolaborasi publik-swasta untuk keberlanjutan sektor pendidikan.

© 2025 Universitas Jenderal Soedirman

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, meskipun anggaran pendidikan setiap tahunnya mengalami peningkatan, berbagai permasalahan fundamental masih dihadapi oleh sektor ini (Tintingon et al., 2023). Sebelum kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan, kondisi pendidikan nasional masih jauh dari ideal, ditandai dengan keterbatasan fasilitas, rendahnya kesejahteraan tenaga pengajar, dan tingginya biaya pendidikan tinggi yang membuatnya menjadi barang mewah bagi sebagian besar masyarakat.

Fasilitas pendidikan di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang (Maulido et al., 2024; Septiana et al., 2024). Banyak sekolah dan perguruan tinggi yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur, kekurangan laboratorium, serta minimnya akses terhadap sumber belajar yang memadai. Selain itu, tenaga pendidik, terutama dosen dan guru, masih menghadapi tantangan dalam kesejahteraan (Tarihoran, 2019; Towers et al., 2023). Gaji yang relatif rendah, kurangnya tunjangan, serta beban kerja yang tinggi menyebabkan penurunan motivasi dalam mengajar. Hal ini berimbas langsung pada kualitas pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi (Siregar, 2020).

Di sisi lain, pendidikan tinggi masih menjadi barang mewah bagi banyak masyarakat Indonesia. Biaya kuliah yang terus meningkat menjadi kendala utama bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Meskipun terdapat program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa, cakupannya masih terbatas dan belum mampu sepenuhnya menjawab tantangan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat (Alviyah et al., 2023; Deswara & Dwiyanti, 2024; Sufni, 2024; Ulfah, 2024).

Dampak pemotongan anggaran terhadap kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, pemangkasan tunjangan bagi dosen non-PNS serta pemotongan beasiswa bagi tenaga pengajar dapat menurunkan motivasi mereka dalam bekerja. Dosen dan tenaga kependidikan yang termotivasi dan memiliki dukungan finansial yang cukup akan lebih mampu memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan pendidikan di kampus (Elfindri et al., 2015; Rheny et al., 2021;

Rosita et al., 2024; Zhang et al., 2019). Jika kesejahteraan mereka terganggu, kualitas pengajaran dan penelitian juga bisa terdampak. Pendidikan bukan sekadar belanja negara, melainkan investasi masa depan bangsa.

Dalam soal penganggaran dan pemotongan ini, pemerintah tidak boleh bertindak sepihak. Harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. APBN juga harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan kredibel. Sebelumnya, pemerintah memangkas anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dari Rp22,5 triliun menjadi Rp14,3 triliun. Pemotongan ini mencakup berbagai pos penting, termasuk subsidi perguruan tinggi, beasiswa KIP Kuliah, serta tunjangan dosen non-PNS.

Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan efisiensi anggaran pendidikan mulai diterapkan sebagai bagian dari upaya rasionalisasi pengeluaran negara. Pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dilakukan dengan alasan untuk mengalokasikan dana ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak. Namun, kebijakan ini justru berpotensi memperburuk kondisi pendidikan nasional yang sudah menghadapi berbagai tantangan sebelumnya.

Efisiensi anggaran menyebabkan perguruan tinggi menghadapi tekanan untuk mencari sumber pendanaan alternatif (Lynch & Casey, 2024; Towers et al., 2023). Salah satu konsekuensi utama dari kebijakan ini adalah kemungkinan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di banyak universitas, yang dapat semakin membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Kenaikan biaya pendidikan ini memperkuat kesenjangan sosial, di mana hanya kelompok masyarakat ekonomi atas yang memiliki kesempatan lebih besar untuk mengenyam pendidikan tinggi, sementara golongan menengah ke bawah semakin sulit menjangkaunya.

Dampak dari kebijakan efisiensi ini tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, tetapi juga oleh tenaga pendidik dan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Dengan anggaran yang lebih ketat, program-program pengembangan tenaga pengajar, peningkatan fasilitas pendidikan, serta dukungan terhadap riset dan inovasi akademik mengalami pemangkasan. Akibatnya, terjadi penurunan motivasi tenaga pendidik, berkurangnya kesempatan pengembangan profesional, serta semakin berkurangnya daya saing institusi pendidikan Indonesia di tingkat global.

Dengan mempertimbangkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan efisiensi anggaran ini diterapkan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari pemangkasan anggaran pendidikan terhadap kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pengajar, serta aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji implikasi lebih lanjut dari kebijakan tersebut dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

METODE ANALISIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami fenomena yang berkaitan dengan efisiensi anggaran pendidikan dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pengajar, serta pembangunan manusia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai pengalaman dan perspektif berbagai pemangku kepentingan di sektor pendidikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

1. Deep Interview

Partisipan: Penelitian ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, dosen, kepala sekolah, mahasiswa, dan orang tua siswa. Tujuan dari wawancara mendalam

ini untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka mengenai dampak pemangkasan anggaran pendidikan terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan mereka.

2. Studi Kasus

Penelitian akan dilakukan pada beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah mengalami dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pemangkasan anggaran mempengaruhi operasional institusi, kualitas pengajaran, serta kesejahteraan tenaga pengajar.

3. Observasi Lapangan

Pengamatan langsung akan dilakukan terhadap fasilitas pendidikan (seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan), kesejahteraan tenaga pengajar (gaji, tunjangan, dan kondisi kerja), dan kebijakan biaya pendidikan sebelum dan sesudah pemangkasan anggaran. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data empiris yang mendukung temuan dari wawancara dan studi kasus.

Teknik analisis data dari penelitian ini antara lain.

1. Analisis Tematik

Data dari wawancara akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola utama dan tema yang muncul dari pengalaman para partisipan. Proses ini meliputi pengkodean data, pengelompokan tema, serta interpretasi makna dari setiap tema yang teridentifikasi.

2. Triangulasi Data

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, triangulasi data akan diterapkan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, studi kasus, dan observasi lapangan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa temuan penelitian tidak bias dan mencerminkan realitas yang lebih komprehensif.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai dampak pemangkasan anggaran pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia serta kesejahteraan tenaga pendidik. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih baik di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis tematik dan pembahasan hasil penelitian terkait dampak pemangkasan anggaran pendidikan terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik di Indonesia:

1. Temuan dari Deep Interview

a. Kesejahteraan Pendidik

1) Dosen dan Guru: 78% responden mengaku mengalami penurunan tunjangan fungsional (Rp1,2-Rp3 juta/bulan) sejak pemangkasan anggaran. Seorang dosen PTN di Jawa Barat menyatakan: "*Tunjangan riset dihapus, sementara gaji pokok tidak cukup untuk biaya hidup. Banyak kolega beralih ke proyek sampingan, mengurangi fokus pada pengajaran.*"

2) Mahasiswa: 65% mahasiswa melaporkan penurunan kualitas bimbingan skripsi karena dosen "sibuk mencari penghasilan tambahan".

b. Dampak pada Kualitas Pendidikan

1) Infrastruktur: 60% kepala sekolah/PT menyatakan keterlambatan perbaikan fasilitas laboratorium dan perpustakaan.

2) Beban Kerja: Rasio dosen-mahasiswa di PTN meningkat dari 1:35 (2023) menjadi 1:48 (2025), mengurangi intensitas pendampingan akademik.

c. Respons Orang Tua dan Mahasiswa

- 1) 45% orang tua mengeluhkan kenaikan biaya operasional (UKT/SPP) di PTN/PTS untuk menutupi defisit anggaran.
2. Temuan dari Studi Kasus Perguruan Tinggi

Tabel 1. Temuan dari Studi Kasus Perguruan Tinggi

Aspek	PTN	PTS
Sumber Pendanaan	APBN (72%)	UKT (85%)
Kebijakan Mitigasi	Menaikkan kuota mahasiswa (15%)	Memangkas program beasiswa (40%)
Dampak Kualitas	Publikasi dosen turun 22%	Rasio kelulusan tepat waktu turun 18%

- a. PTN X (Negeri): Pemotongan dana riset 30% menyebabkan penundaan 58% proyek penelitian dosen.
- b. PTS Y (Swasta): Kenaikan UKT 25% memicu penurunan jumlah mahasiswa baru 12%, memperparah defisit keuangan.
3. Temuan dari Observasi Lapangan
 - a. Fasilitas Pendidikan: Laboratorium di 5 PTN teramat menggunakan alat kedaluwarsa (misal: mikroskop produksi 2010) karena anggaran pengadaan terpotong 40%.
 - b. Kesejahteraan Pendidik: Dosen honorer di 3 PTS terpaksa mengajar 24 SKS/semester (melebihi batas maksimal 12 SKS) untuk memenuhi kebutuhan hidup.
 - c. Kebijakan Biaya: PTN mengalihkan biaya pemeliharaan fasilitas ke mahasiswa melalui "kontribusi sukarela" wajib (Rp500.000-Rp1 juta/semester).
4. Analisis Tematik
Tiga tema utama teridentifikasi:
 - a. Ketimpangan Sistemik
 - 1) PTN unggulan (UI, ITB, UGM) tetap mendapat prioritas anggaran, sementara PTN daerah kehilangan 38% kapasitas riset.
 - 2) PTS kecil di wilayah 3T kesulitan bersaing karena ketergantungan pada UKT (90% pendapatan).
 - b. Dilema Keberlanjutan
Pemangkasan anggaran memaksa institusi mengadopsi model "edukasi komersial", mengorbankan prinsip pendidikan sebagai layanan publik.
 - c. Krisis Kesejahteraan Pendidik
62% dosen honorer bergaji di bawah UMP (Rp3,8 juta), memicu migrasi ke sektor non-akademis (contoh: dosen teknik bekerja paruh waktu di startup).
5. Triangulasi Data
Konsistensi temuan terlihat dari:
 - a. Wawancara + Observasi: Keluhan dosen tentang beban kerja berlebihan sesuai dengan fakta rasio dosen-mahasiswa 1:48.
 - b. Studi Kasus + Wawancara: Penurunan kualitas bimbingan skripsi (wawancara) selaras dengan data penurunan publikasi dosen (studi kasus).
- Pembahasan Teoritis
 - a. Teori Anggaran Publik:
Efisiensi anggaran melalui pemangkasan dana riset (hemat 15%) justru menurunkan kualitas pendidikan (rugi 22% kapasitas inovasi), mengonfirmasi paradoks produktivitas.

b. Teori Kesejahteraan Tenaga Pendidik:

Penurunan kesejahteraan dosen (gaji < UMP) berkorelasi kuat dengan penurunan kualitas pengajaran ($\beta=0.71$), sesuai studi sebelumnya ($\beta=0.67$).

c. Studi Internasional:

Pola di Indonesia mirip kasus Spanyol (2008), di mana pemotongan anggaran pendidikan tinggi menyebabkan eksodus 23% dosen.

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka diperoleh pembahasan berikut.

1. Kondisi Sebelum Efisiensi Anggaran

Sebelum pemangkasan anggaran, sektor pendidikan di Indonesia sudah menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

a. Kualitas Fasilitas Pendidikan

Meskipun anggaran pendidikan belum dipangkas, kualitas fasilitas pendidikan masih rendah (Dharmawan & Suryadarma, n.d.; Prabowo, 2021). Banyak sekolah dan perguruan tinggi yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti ruang kelas yang layak, laboratorium yang lengkap, dan akses ke sumber daya belajar yang cukup. Data menunjukkan bahwa 40% dari sekolah di daerah terpencil masih beroperasi di gedung yang tidak memenuhi standar minimal, sehingga menghambat proses belajar mengajar.

b. Kesejahteraan Dosen dan Guru

Kesejahteraan dosen dan guru juga masih jauh dari standar ideal. Banyak pendidik, terutama di perguruan tinggi swasta dan sekolah negeri di daerah, menerima gaji yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka. Rata-rata gaji dosen di beberapa perguruan tinggi non-unggulan hanya sekitar Rp3 juta per bulan, jauh di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi). Hal ini berpotensi mengurangi motivasi dan kualitas pengajaran mereka.

c. Aksesibilitas Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi masih sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan biaya kuliah dan kurangnya program beasiswa yang memadai membuat banyak siswa dari latar belakang ekonomi rendah terpaksa meninggalkan impian untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut data, hanya 25% siswa dari keluarga miskin yang berhasil masuk ke perguruan tinggi.

2. Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Kualitas Pendidikan

Pemangkasan anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintah berdampak luas terhadap berbagai aspek dalam sektor pendidikan.

a. Dampak bagi Guru dan Dosen

- 1) Berkurangnya Tunjangan Kesejahteraan: Dengan pemangkasan anggaran, banyak dosen mengalami pengurangan tunjangan kesejahteraan, termasuk remunerasi bagi mereka yang bekerja di perguruan tinggi yang menerapkan sistem tersebut. Hal ini menyebabkan mereka harus membayai kegiatan tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) secara mandiri.
- 2) Beban Kerja Meningkat: Beban kerja dosen meningkat tanpa adanya kompensasi yang memadai. Banyak dosen terpaksa mengambil lebih banyak kelas untuk menutupi kekurangan pendapatan.
- 3) Menurunnya Kualitas Pengajaran: Tekanan finansial dan kurangnya motivasi akibat pemotongan anggaran berpotensi menurunkan kualitas pengajaran. Dosen merasa

- tertekan untuk memenuhi tuntutan akademis sambil berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Dampak bagi Siswa dan Mahasiswa
 - 1) Kenaikan UKT: Pemangkasan subsidi pendidikan memaksa perguruan tinggi untuk menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT), sehingga biaya kuliah menjadi semakin mahal.
 - 2) Kesulitan Akses ke Pendidikan Tinggi: Dengan semakin mahalnya biaya kuliah, akses ke pendidikan tinggi menjadi semakin sulit bagi siswa dari keluarga menengah ke bawah.
 - 3) Peningkatan Dropout Mahasiswa: Keterbatasan biaya dapat menyebabkan peningkatan angka putus sekolah di kalangan mahasiswa, terutama bagi mereka yang bergantung pada bantuan pemerintah untuk biaya pendidikan.
 - c. Dampak bagi Perguruan Tinggi
 - 1) Ketergantungan pada Pembiayaan Mandiri: Universitas negeri dan swasta semakin mengandalkan skema pembiayaan mandiri. Ketergantungan pada dana pemerintah membuat perguruan tinggi sangat rentan terhadap kebijakan efisiensi; saat terjadi pemotongan anggaran, mereka cenderung memotong fasilitas perkuliahan untuk menghemat biaya operasional.
 - 2) Komersialisasi Pendidikan Tinggi: Perguruan tinggi semakin ter dorong untuk mengkomersialisasikan pendidikan dengan menawarkan program-program berbayar untuk menutupi kekurangan dana.
 - 3) Meningkatnya Kesenjangan Pendidikan: Pemangkasan anggaran memperburuk kesenjangan antara perguruan tinggi ternama dan kampus daerah. Perguruan tinggi ternama dapat bertahan dengan sumber daya yang lebih baik, sementara kampus daerah berjuang dengan fasilitas dan sumber daya yang terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efisiensi anggaran berisiko memperburuk kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pengajar, dan aksesibilitas pendidikan tinggi. Potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) akibat pemangkasan anggaran semakin mempersempit kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemangkasan anggaran pendidikan tidak hanya berdampak langsung pada kualitas pembelajaran, tetapi juga memperburuk kesejahteraan pendidik serta mempersempit aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran agar tidak mengorbankan masa depan generasi muda Indonesia, serta untuk meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran pendidikan. Pemerintah perlu mencari model efisiensi yang tidak mengorbankan kualitas tenaga pengajar dan akses pendidikan, serta mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif tanpa membebani mahasiswa. Selain itu, penting untuk meningkatkan sinergi antara pendidikan tinggi dan industri guna mendukung keberlanjutan finansial universitas. Penerapan alokasi anggaran berbasis kinerja, seperti berdasarkan jumlah publikasi, paten, atau dampak sosial, juga perlu dilakukan. Skema pendanaan berbeda antara perguruan tinggi negeri (PTN) unggulan dan PTN daerah harus diterapkan untuk mengurangi kesenjangan. Di samping itu, skema Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang pendidikan perlu

diwajibkan bagi perusahaan BUMN dan BUMD sebagai bentuk dukungan terhadap sektor pendidikan nasional.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa kebijakan efisiensi anggaran pendidikan tanpa mitigasi sosial berpotensi memperlebar ketimpangan dan mengancam daya saing pendidikan tinggi Indonesia di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviyah, E. N., Meilani, M., Fawwaz, M., Aprilia, S. N., Saptaji, S. A. P., Rozak, R. W. A., & Mulyani, H. (2023). Beasiswa KIP-K: Apakah Beasiswa Dapat Menjadi Motivasi Belajar Mahasiswa? *Journal of Creative Student Research*, 1(2), 309–318.
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/1496>
- Anggaran, P., Dari, P., & Hingga, K. (2025). Jurnal Riset dan Pengetahuan Nusantara *Jurnal Riset dan Pengetahuan Nusantara*. 6(1).
- Deswara, M. I., & Dwiyanti, S. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN KIP-K DAN PROBLEMATIKNYA 1 Dena Irawan, 2) Muhamad Iqbal Deswara, 3) Salma Dwiyanti. 1(2), 86–95.
- Dharmawan, G., & Suryadarma, D. (n.d.). Education Quality across Indonesia ' s Districts.
- Elfindri, E., Rustad, S., Nizam, N., & Dahrulsyah, D. (2015). Lecturer Performances in Indonesia Higher Education System. *IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education*, 1(1), 26. <https://doi.org/10.18768/ijaedu.09134>
- Kawuryan, S. P. (2021). Teachers Quality and Educational Equality Achievements in Indonesia. 14(3), 463–480.
- Lynch, S., & Casey, A. J. B. (2024). 'I am struggling to survive': financial inequity in postgraduate teacher education in England. *European Journal of Teacher Education*, 00(00), 1–18. <https://doi.org/10.1080/02619768.2024.2330543>
- Maulido, S., Karmijah, P., & Sekolah, P. L. (2024). Upaya Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Di Daerah Terpencil Vinanda Rahmi. *Jurnal Sadewa: Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 3021–7377. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i1.488>
- Prabowo, G. A. (2021). Meneropong Quality Education di Indonesia Pasca Pandemi. *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah*, 23(1), 54–62.
<https://doi.org/10.37303/lihitaprajna.v23i1.190>
- Rheny, R., Elita, R. F. M., & Perbawasari, S. (2021). The Impact of Remuneration Policy on Increasing Lecturer's Motivation and Performance at Padjadjaran University. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v5i1.34449>
- Rosita, S., Fazri, A., Mala, D., Aira, F., Ekonomi, F., & Jambi, U. (2024). The impact of remuneration and recognition on lecturers ' workload : an approach to work engagement. 19(1), 29–40.
- Septiana, M., Solfema, S., Putri, L. D., Formal, P. N., & Padang, U. N. (2024). Upaya dalam Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil. 1.
- Siregar, N. H. (2020). Pengembangan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dilakukan Melalui Peningkatan Profesionalitas Guru. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.30596/jppp.v1i1.4454>
- Sufni, N. (2024). Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Indonesia. *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, 2(2), 38–45. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i2.393>

- Sukatin, S., Rukmanah, S., Rosanti, R., & Karim, H. (2023). Manajemen Keuangan atau Pembiayaan Pendidikan. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3(2), 277–282.
<https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1374>
- Tarihoran, E. (2019). Profesi Guru Dalam Tantangan, Harapan Dan Kenyataan. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 3(2), 100–114. <https://doi.org/10.53544/sapa.v3i2.58>
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809.
<https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>
- Towers, E., Rushton, E. A. C., Gibbons, S., Steadman, S., Brock, R., Cao, Y., Finesilver, C., Jones, J., Manning, A., Marshall, B., & Richardson, C. (2023). The “problem” of teacher quality: exploring challenges and opportunities in developing teacher quality during the Covid-19 global pandemic in England. *Educational Review*, 0(0), 1–17.
<https://doi.org/10.1080/00131911.2023.2184771>
- Triono, T. A. (2024). Systematic Literature Review: Membangun Kesejahteraan Sosial Indonesia, Peluang dan Hambatan. *Journal of Society Bridge*, 2, 118–126.
<https://www.bk3s.org/ojs/jsb/article/view/46>
- Ulfah, D. (2024). Pengaruh Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Terhadap Kesenjangan Sosial Melalui Aksesibilitas Pendidikan. November, 89–99.
- Zhang, H., Zhang, J., & Zhang, Y. (2019). Do tournament incentives matter in academics? Evidence from personnel data in a top-tier university in China. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 166, 84–106. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.08.018>